

SK KEPALA BADAN PE
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014-2018**

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|--|---|---------|--|--|
| 1 | Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan dan anggaran yang transparans berbasis sistem informasi manajemen keuangan daerah secara elektronik | Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah yang audited | dokumen | Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sudah di audit oleh BPK RI | SIMDA (DPA) SIMDA (Lap. Keuangan) SIMDA (SP2D) |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|--|--|----------------------|--|-------------|
| 2 | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan daerah | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WTP, WDP, Disclaimer | Hasil Penilaian atas LKD Pemerintah Kabupaten Merangin | Jenis Opini |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|---------|-----------|--------|-------------------------------|-------------|
|----|---------|-----------|--------|-------------------------------|-------------|

INGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

J

:

: 2017

:PERUBAHAN KETIGA INDIKATOR KINERJA

UTAMA BPKAD KAB. MERANGIN

TAHUN 2014-2018

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penataan sistem p

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Jumlah Laporan Pe

3. Program Pengelolaan Aset Daerah

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Program Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

Penataan sistem pe

**KEPALA BPKAD
KAB. MERANGIN**

**Ir. FAJARMAN, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660424 199203 1 005**

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Penataan sistem pe

engelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara

ngelolaan Keuangan daerah yang Audited

engelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara

engelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara